

**METODE PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2006 - 2010**

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		METODE PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN			
1	Terciptanya koordinasi kebijakan pembinaan keagamaan, pendidikan, ketenagakerjaan, Pemuda Olah Raga, Sosial Budaya dan Peranan Wanita	-	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang dilaksanakan	(kali)	frekwensi sosialisasi GSI	1	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan KB	1	Kegiatan ASI dan Kepedulian Masyarakat pada ibu melahirkan
		-	Sosialisasi Ekonomi Kerakyatan khususnya bagi pemberdayaan kaum wanita yang dilaksanakan	(kali)	frekwensi sosialisasi EK tuk PKW			2	Meningkatkan ekonomi produktif kerakyatan khususnya wanita
		-	Bantuan Pendidikan kepada Masyarakat yang disalurkan	(%)	jml penyaluran dibanding tot APBD				
		-	Bantuan kepada Lembaga Keagamaan yang disalurkan	(%)	jml penyaluran dibanding tot APBD	2	Penyaluran Bantuan Masyarakat	1	Penyaluran Bantuan Pendidikan
		-	Anak Putus Sekolah yang dilatih	(%)	total aps dilatih dibanding total aps			2	Penyaluran Bantuan Keagamaan
		-	Pemuda dan pelajar berprestasi yang terlatih kewirausahaan	(org)	jml pemuda dan pelajar yang dilatih			3	Pelatihan Anak Putus Sekolah

Terciptanya koordinasi kebijakan bidang kehumasan dalam menunjang peningkatan akses dan sebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	- Terlaksananya Porseni Pemuda Tk. Kota Samarinda	(keg)	frekwensi keg Porseni Pemuda yg terlaksana	3	Peningkatan/Pembinaan Usaha	1	Meningkatkan Kemampuan Para Pemuda dan Pelajar berprestasi
	- Keluarga Sakinah Tk Kota Samarinda yang terpilih	(klg)	Jml Keluarga Sakinah terpilih	4	Peningkatan Peranan Pemuda dan Olah Raga	1	Pelaksanaan Porseni Pemuda
				5	Pembinaan Keluarga	2	Pemilihan Keluarga Sakinah
	- Jumlah kerjasama dengan media cetak dan elektronik	(buah)	jml media cetak dan elektronik yang bekerjasama dengan Pemkot	6	Program Kerjasama dengan Mass Media	1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
						2	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
						3	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
	- Perda Penyiaran disahkan	(buah)	Jml Perda disahkan tepat waktu	7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran
						2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
						3	Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
	- informasi kegiatan dan kebijakan Pemkot Samarinda secara online sistem	(kec)	jml kec yang online sistem informasi			4	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Terciptanya koordinasi kebijakan masalah hukum dan peraturan perundangan	- informasi dan promosi dalam Website Kota Samarinda yang up to date	(%)	jml informasi website up to date dibanding jml informasi keseluruhan yang ditampilkan	8	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	5	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi		
	- Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan daerah dibidang penyelenggaraan dan pembangunan	(%)	menurunnya % jml pelanggaran masyarakat terhadap perda			9	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1	Penyusunan Sistem Informasi
	- Tersedianya Produk Hukum Daerah	(%)	jml produk hukum daerah yang terbit dibandingkan yang seharusnya di perda kan					2	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
	- Tingkat Penyelesaian Pemkot di Pengadilan	(%)	jml kasus selesai, dibanding jml kasus keseluruhan					3	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Terciptanya koordinasi kebijakan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	-	Kepala Keluarga miskin mendapat beras dengan harga murah	(%)	Jml kk miskin penerima raskin dibanding jml kk miskin	1 0	Kemandirian Bidang Ekonomi	1	Penunjang Kegiatan Agro dan Agri	
	-	Terselenggaranya Kegiatan Pameran dan Promosi	(keg)	jml keg pameran dan promosi terselenggara				2	Penunjang Kegiatan Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program Raskin (UPM-PP RASKIN)
	-	Penambahan PAD dari Retribusi Surat Ijin Usaha	(%)	Jml PAD dari Retribusi SIU				3	Penunjang Kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan
Terciptanya koordinasi kebijakan tentang pembinaan tata pemerintahan daerah bawahan	-	Kejelasan batas masing-masing wilayah kecamatan/kelurahan	(%)	wilayah yang sudah jelas batasnya dibanding keseluruhan jml wilayah di kota samarinda	1 2	Pengelolaan Perijinan di Bidang Transportasi, Energi (BBM) dan Kehutanan	1	Pembuatan Surat Ijin Kendaraan Bermotor (SIUAKB)	
	-	Data Kecamatan Dalam Angka	(buku)	buku kec dlm angka yang terbit				2	Pemberian Persetujuan Peremajaan Angkutan Kota (Angkot)
	-	Pemekaran Kecamatan	(%)	jml kecamatan hasil pemekaran dibanding jml		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi	
							2	Peningkatan SDM Pelaksanaan teknis Adipura Kecamatan	
							3	Penyusunan Kecamatan dalam Angka (6 Kecamatan)	

Terciptanya koordinasi kebijakan organisasi, kelembagaan dan tata laksana	- LKPJ da LPPD tepat waktu	(%)	kec yang seharusnya dimekarkan LKPJ da LPPD tepat waktu	1 3	Program Pengembangan Kelembagaan	4	Pemekaran 5 (lima) Kecamatan
	- Monografi Kecamatan	(buku)	buku kec dlm angka yang terbit			5	Evaluasi Kewenangan
	- Evaluasi Tugas Camat	(%)	hasil pengukuran kinerja kecamatan			6	Pengembangan Otonomi Daerah
	- Data Otonomi Daerah	(buku)	buku kec dlm angka yang terbit			7	Penyusunan LKPJ
	- Tertib adm pemerintahanan skpd	(%)	SKPD yang telah menyusun Lap tepat waktu dibanding jml seluruh SKPD			8	Penyusunan LPPD
	- Organisasi Perangkat Daerah sesuai perundangan yang berlaku	(%)	Perda OPD sesuai dengan ketentuan (PP41)			9	Monografi Kecamatan
	- Struktur Organisasi Perangkat Daerah tersusun	(%)	Jml struktur OPD yang telah disusun			1	Menyusun Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
	- Data Kewenangan Pemerintah Kota tersedia	(buku)	Tersedianya data pelaksanaan			2	Pengolahan dan Penyusunan Data Kewenangan Pemerintah Kota
						3	Pembuatan dan Penyempurnaan Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota

			Kewenangan per bidang Pemkot Samarinda dalam pelaksanaan Otonomi Daerah			
	- Pengembangan dan Penetapan Status Kelembagaan	(%)	Jml nomenklatur lembaga yg telah disusun			4 Evaluasi Pengembangan dan Penetapan Status Kelembagaan
	- Kedisiplinan PNS dalam Berpakaian Dinas meningkat	(%)	% PNS disiplin dalam berpakaian dinas dan kelengkapannya	1 4	Program Ketatalaksanaan	1 Penyediaan Kelengkapan Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas
	- Standar Pelayanan Prima tersusun	(%)	Jml SPM yg ada dibanding dg yg seharusnya ada			2 Penghimpunan dan Penyusunan Standarisasi Pelayanan Prima
	- Mekanisme Kerja dan Tupoksi Perangkat Daerah tersusun	(%)	Jml keg monev terlaksana			3 Penyusunan Mekanisme kerja dan Tupoksi Perangkat Daerah
	- Monev Pelaksanaan Pelayanan Publik terlaksana	(Keg)	Jml keg monev yang terlaksana			4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik
	- Jumlah SKPD telah menyusun Renstra, Renja, PK dan LAKIP	(%)	% SKPD yang telah menyusun Renstra, Renja, PK dan LAIP			5 Penyusunan Renstra
	- Data Aparatur	(%)	% Data	1	Program Analisa	1 Penyusunan dan Evaluasi Data Aparatur

		Perangkat daerah tersusun dan terevaluasi		Aparatur Perangkat daerah tersusun dan terevaluasi	5	Formasi Jabatan	Perangkat Daerah
		- Ketepatan Penempatan Jabatan dan beban kerja Pegawai Pemerintah Kota	(%)	% Data jabatan dan beban kerja yg telah sesuai dengan hasil analisa anforjab			2 Bimbingan Teknis Analisa Jabatan
							3 Melaksanakan Kegiatan Anjab untuk Menghitung Beban Kerja
	Terciptanya koordinasi dan pengendalian tugas penyelenggaraan pembangunan	- Monev Pelaksanaan Kegiatan pembangunan	(%)	Jumlah kegiatan yg dimonitoring dibanding jml seluruh kegiatan	1 6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
	Terciptanya koordinasi kebijakan bidang pertanahan	- Sistem Informasi Pertanahan Kota Samarinda yang akurat dan lengkap	(%)	Tersedianya Unifikasi Peta dan Integrasi Data pertanahan Kota Samarinda	1 7	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	1 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan
		- Jumlah penyelesaian konflik pertanahan	(%)	Jumlah konflik tanah yg diselesaikan dibanding jml konflik tanah yg ada	1 8	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

4	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Keuangan daerah	-	Data Penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang valid up to date	(%)	% Data Penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kota Samarinda yang valid up to date	19	Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1	Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	
		-	Analisa Standar Belanja tersusun	(buku)	tersedianya buku Analisa Standar Belanja	20	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Penyusunan Analisa Standar Belanja	
		-	Standar Satuan Harga tersusun	(Buku)	SK Walikota ttg buku Standar Satuan Harga Tepat Waktu				2	penyusunan standar satuan harga
		-	Kebijakan akuntansi pemerintah daerah tersusun	(%)	SK Walikota ttg Kebijakan Akuntansi Daerah				2	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
		-	Manual sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah tersusun	(%)	SK Walikota ttg Manual sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah				3	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
		-	Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	(%)	Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan					

			Daerah terbit			
	- Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	(%)	Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbit		4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
	- APBD tepat waktu	(%)	APBD disahkan tepat waktu		5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
	- Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis komputer	(%)	Aplikasi Keuangan berbasis komputer terintegrasi disemua SKPD		6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
	- Menurunnya Jumlah dan Nilai temuan BPK terkait dengan administrasi dan keuangan	(%)	(jml temuan tahun lalu dikurang temuan th ini)/temuan th lalu x 100%		7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
	- Meningkatnya Opini BPK atas Laporan Keuangan Kota Samarinda s.d. WTP	(%)	meningkatnya opini dari th lalu dibanding WTP		8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
	- Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	(%)	SPJ SKPD, LKPJ tepat waktu		9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
	- jumlah investasi daerah	(%)	Meningkatnya investasi daerah		10	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah
					1	Pengembangan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
					1	

meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan barang daerah	-	Data aset/ barang daerah yang valid dan up to date	(%)	Adanya data aset hasil inventarisasi dan mutasi yang terkini dan valid	2 1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
	-	Jml Aset hasil Revaluasi/ appraisal	(%)	Data Hasil Revaluasi Aset/Barang Daerah			2	Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah
	-	Jml Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia secara memadai	(%)	Kebutuhan dibanding yang tersedia memadai	2 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Kegiatan rutin SKPD
					2 3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pembangunan/pengadaan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Kualitas Aparatur	-	Jumlah Pegawai Naik Pangkat tepat waktu	(%)	Jml Pegawai Naik Pangkat Tepat waktu dibanding yang seharusnya naik pangkat	2 4	Program Peningkatan Administrasi dan Pengembangan Kepegawaian	1	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
	-	Jumlah Pelanggaran disiplin pegawai menurun	(%)	Jml Penurunan pelanggaran tahun ini dibanding tahun lalu			2	Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
	-	Jumlah Bantuan Tugas Belajar Pegawai	(%)	Alokasi Tahun ini dibanding yg seharusnya			3	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

		-	Penambahan Jml Pegawai	(%)	Penambahan dibanding kebutuhan formasi			4	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yan Berprestasi
		-	Sistem adm kepegawaian	(%)	jml pegawai yang dilayani dibanding jml seluruh peg			5	Proses Penanganan Kasus Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
						2	Program peningkatan disiplin aparatur	1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
						5	Program Fasilitas	1	Pemulangan pegawai yang pensiun
						2	Pindah / Purna Tugas		
						6			